

Pengembangan Omah Wisata Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kota Wisata Batu

Ardiansyah Saifudin Yahya¹⁾, Hendro Wardhono²⁾, Eny Haryati³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: ardiansahsy.id@gmail.com

ABSTRAK

Omah wisata merupakan kegiatan pariwisata dengan konsep mengedepankan mitigasi bencana, tidak melupakan kearifan lokal dan pelestarian lingkungan. Tujuan utama daripada omah wisata sendiri yakni meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan mempromosikan Desa Junrejo Kota Batu. Dalam pelaksanaan, kolaborasi masih belum maksimal dalam pengembangan omah wisata tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam perspektif *Collaborative Governance* yang mengacu pada teori Ansell dan Gash, dengan meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambat proses kolaborasi tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara pada aktor *Pentahelix* yakni Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat atau komunitas, dan media massa. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi kolaborasi antar aktor dalam pengembangan omah wisata masih berjalan belum maksimal. Dari pola pengawasannya, dukungan dari pemerintah sampai saat ini bisa dinilai kurang mendukung, karena dalam *Collaborative Governance* ada kriteria yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berkolaborasi. Dengan adanya omah wisata ini, masyarakat khususnya di Desa Junrejo lebih meningkatkan partisipasi yang besar dalam rangka pengembangan omah wisata Junrejo serta masyarakat dapat secara mandiri dengan memanfaatkan konsep yang sudah dibuat agar dapat ikut serta partisipasi dalam jangka panjang dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah saja.

Kata Kunci: Omah Wisata, *Collaborative Governance*, *Pentahelix*

Abstract

Omah tourism is a tourism activity with the concept of prioritizing disaster mitigation, not forgetting local wisdom and environmental preservation. The main goal of the tourism company itself is to improve the economy of the local community and promote Junrejo Village, Batu City. In implementation, collaboration is still not optimal in developing the tourist home. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Meanwhile, the Collaborative Governance perspective refers to Ansell and Gash's theory, covering initial conditions, institutional design, leadership and collaboration processes, as well as supporting and inhibiting factors for the collaboration process. The data collection technique in this research is using interviews with Pentahelix actors, namely the government, business world, academics, society or community, and mass media. The results of this research show that the implementation of collaboration between actors in the development of tourist homes is still not optimal. From the monitoring pattern, support from the government to date can be considered less supportive, because in Collaborative Governance there are criteria that serve as benchmarks for success in collaboration. With the existence of this tourist village, the community, especially in Junrejo Village, will increase their participation in developing the Junrejo tourist village and the community can independently utilize the concept that has been created so that they can participate in the long term and not depend on government assistance alone.

Keywords: Omah Wisata, *Collaborative Governance*, *Pentahelix*

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang memiliki keunikan keindahan alam dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisata, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pariwisata umum sifatnya menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam macam keinginan.

Pariwisata sebagai suatu sistem, hal ini berarti bahwa berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari sub sistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya dan seterusnya dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terikat. Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadi perubahan pada subsistem lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru.

Persepsi wisatawan terhadap lingkungan daerah tujuan wisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem informasi, promosi, dan petunjuk. Subsistem ini berkaitan dengan pembentukan image dan persepsi wisatawan, promosi dan penjualan, tersedianya pramuwisata dan penunjuk jalan yang jelas, serta informasi dan publikasi.

Dalam sistem pariwisata ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam

tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisata nusantara, penyerapan tenaga kerja pariwisata, dan kenaikan indeks daya saing pariwisata Indonesia di ranah global.

Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, seperti kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.

Aktivitas pariwisata memerlukan ruang gerak dan waktu fleksibel. Artinya kerjasama dan komitmen akan terbentuk kemitraan yang saling mengisi, maka aktivitas berwisata yang memiliki mobilitas tanpa batas itu tidak akan mengalami kendala karena jalur-jalur yang menghubungkan antar atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya sudah tertata, terhubung dengan baik, dan dari segi keamanan dapat dikoordinasikan bersama.

Mengutip kegiatan Seminar yang bertema pariwisata berbasis mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan bahwa masyarakat sekitar obyek dan atraksi wisata harus ikut berpartisipasi yang mewujudkan ke dalam tindakan memberikan perasaan aman yang berupa keramahan dan perasaan yang tulus ketika menerima kedatangan para wisatawan. Di samping itu, masyarakat harus ikut terlibat dalam mengambil keputusan pembangunan pariwisata, berpartisipasi bersama-sama pemerintah daerah dan jasa-jasa kepariwisataan, memelihara sarana-sarana yang terdapat di obyek dan atraksi wisata, serta ikut andil dalam mendukung semua kegiatan pariwisata dalam bentuk penjualan produk UMKM khas daerah tersebut dengan tidak lupa

memperhatikan faktor kehygienisan dan layanan yang baik.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan jenis pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam mengelola potensi wisata di lingkungannya. Masyarakat pada dasarnya tidak dapat mengelola potensi wisatanya sendiri, mereka membutuhkan adanya dorongan dari luar. Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah dan masyarakat memiliki peran serta fungsi masing-masing. Pemerintah berperan dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sedangkan masyarakat terlibat dalam pengelolaan potensi pariwisata yang ada di sekitar untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pariwisata memang sangat berpotensi bagi lingkungannya terutama perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata. Dalam pembangunan wisata juga memerlukan sumber daya manusia yang profesional untuk mengkonsep dan selalu mengembangkan, sehingga wisata tersebut dapat berkembang dan menjadi wisata yang dikenal oleh kalangan luar daerah. Pembangunan wisata perlu strategi yang efektif dan efisien dengan strategi tersebut maka dapat dipastikan wisata tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan wisata yang baik untuk wisata dan pastinya untuk lingkungan daerah dan juga masyarakat sekitarnya.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tersebut diharapkan tidak membebani anggaran Pemerintah daerah dan meningkatkan investasi pada berbagai sektor pendukung wisata., salah satu desa di Kota Batu adalah Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo menjadi salah satu desa yang memiliki potensi wisata menarik. Desa ini memiliki tiga dusun didalam, yaitu Dusun Rejoso, Jeding, dan Junwatu. Ketiga dusun ini saling berkaitan satu sama lain namun setiap dusun memiliki potensi wisata yang berbeda-beda.

Misalnya saja untuk kerajinan cobek batu asli yang sangat terkenal dari desa ini, tetapi hanya saja sekarang sudah terjadi penyusutan produksi untuk kerajinan batu asli karena kurangnya angka pengrajin dan tidak adanya

kaderisasi pengrajin. Lokasinya berpusat di Dusun Rejoso, selain cobek batu asli di dusun ini juga terdapat kerajinan kayu alat-alat rumah tangga seperti sutil, talenan, cobek, ulekan, dan penggiling kue. Masih di Dusun Rejoso, Anda juga dapat menemukan pengrajin tas plastik, cemilan khas kota Batu, gantungan baju yang terbuat dari kayu, kerajinan kayu alat refleksi tradisional, dan juga furniture perlengkapan rumah tangga. Jadi segala hal yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga dan camilan dapat anda temui di Dusun Rejoso ini.

Dusun Junwatu masyarakat budidaya bunga taman atau tanaman hias. Berbagai macam dan juga jenis bunga taman terdapat di dusun ini. Bunga hias dapat mempercantik taman di halaman rumah dan bunga hias yang cantik-cantik enak dipandang mata. Selain budidaya bunga taman, Dusun Junwatu juga memiliki banyak tempat kuliner makanan Indonesia yang dapat Anda cicipi. Harganya pun bervariasi, mulai dari 10 ribu hingga 30 ribu. Walaupun tempat makan kuliner masih sederhana, namun rasanya tidak kalah enak dengan restoran berbintang lima.

Dusun Jeding juga diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kamar mandi ini memiliki kisah sejarah unik di balik namanya. Dusun ini diberi nama Jeding karena sejarahnya dahulu kala pada zaman Kerajaan Singosari, seorang putri dari kerajaan singosari melarikan diri dari kerajaannya yang hampir diruntuh kemunduran, lalu sang putri pergi ke sebuah dusun, dan di dusun ini terkenal banyak sumber mata air yang banyak dan sampai saat berstatus mengalir dengan debit yang deras.

Dengan hadirnya usaha atau pekerjaan baru tidak hanya kearifan lokal yang berubah dari segi ekonomi tetapi juga merubah lingkungannya dan menjadikan identitas warga setempat. Desa Junrejo Kota Batu merupakan salah satu dusun yang warganya bekerja sebagai petani dan sebagian beralih menjadi pekerja *home* industri kerajinan cobek dan kayu, serta ini menjadikan Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sebagai salah satu tujuan destinasi wisata.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di

Kota Batu ini dengan judul “Konsep Omah Wisata Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kota Wisata Batu”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Collaborative Governance

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yakni disebut konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat bekerjasama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dengan bekerja secara sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melihatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.

2. Tujuan Pelaksanaan Collaborative Governance

Collaborative governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi (Ansell dan Gash, 2007). Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.

Pendapat diatas menyatakan bahwa *collaborative governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek yang dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program kegiatannya sendiri, Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlihat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep *collaborative governance* yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam Sudarmono bahwa *Collaborative Governance* muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan secara sadar karena alasan-alasan dan pentingnya konsep ini dilakukan sebagai berikut ini (Junaedi, 2015):

- a) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi.
- b) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit direndam.
- c) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik.
- d) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan.

- e) Ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim untuk menggunakan arena-arena institusi untuk menghambat keputusan.
- f) Mobilisasi kelompok kepentingan.
- g) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

3. Dimensi-Dimensi Dalam Collaborative Governance

Kolaborasi yang efektif diupayakan untuk pencapaian sasaran klien, meningkatkan hubungan-hubungan antar organisasi dan pengembangan organisasi, O Leary, Gazley, McGuire, and Bingham dalam Junadi (2015:14) menyebutkan mengenai tiga dimensi yang berbeda ini merefleksikan jenis-jenis sasaran organisasi yang tidak sama yang dicari dari kolaborasi antar organisasi.

Pencapaian sasaran klien menunjukkan pada tujuan utama dari sebagian usaha sektor publik untuk meningkatkan kolaborasi, yaitu mendapatkan sumber daya yang akan meningkatkan kedua hal yakni manfaat kolektif dan potensi kolaborasi organisasi. Jika organisasi dalam kegiatan kolaboratif sama baiknya, hal ini dapat meningkatkan modal sosial pada masyarakat yang dilayani. Hubungan yang lebih baik antara organisasi untuk meningkatkan kesempatan memecahkan masalah dan membuka jalan bagi hubungan masa depan yang lebih baik. Ketiga, pengembangan organisasi sebagian besar langsung menguntungkan organisasi. Jika kolaborasi meningkatkan pengembangan organisasi, hal ini dapat meningkatkan kapasitasnya untuk bersaing secara efektif atas kontrak masa depan dan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mencapai misi dan tujuan.

Dalam konteks pengelolaan organisasi seperti pengembangan pariwisata, dimensi-dimensi kolaborasi ini perlu dijadikan acuan dalam pelaksanaan praktik kolaborasi. Dengan adanya pelaksanaan kolaborasi, maka ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dari Omah Wisata karena adanya

pengembangan dalam aspek sarana prasarana serta sumber daya manusia dari unsur yang berbeda. Kolaborasi dalam pengelolaan Omah Wisata juga dilakukan untuk menjaga hubungan antar unsur organisasi dalam kolaborasi atau institusi.

Karena dalam prakteknya kolaborasi membutuhkan lebih dari satu organisasi atau institusi yang terlibat. Hubungan antar organisasi dalam kolaborasi dapat pula memecahkan masalah pengembangan Omah Wisata yang dimungkinkan tidak mampu diselesaikan oleh satu organisasi atau instansi semata, akan tetapi dimungkinkan dapat terselesaikan oleh peran institusi atau organisasi lain. Pelaksanaan kolaborasi ini pun akan saling menguntungkan tiap organisasi atau institusi yang terlibat dalam pengembangan Omah Wisata. Hal ini lantaran setiap institusi dan unsur organisasi saling mengembangkan kapasitasnya dalam daya tarik wisata di Omah Wisata dan mampu mencapai tujuannya dalam pengembangan Omah Wisata.

4. Model Collaborative Governance Menurut Ansell dan Gash

Model ini memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil menjadi sub variabel.

a) Kondisi Awal

Dari berbagai literatur mengungkap bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan *stakeholder*, sehingga muncul anggapan saling bermusuhan.

b) Desain Kelembagaan

Dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

- c) Kepemimpinan Fasilitatif
Kepemimpinan fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi.
- d) Proses kolaborasi
Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - (1) Bagaimana membangun kepercayaan antar anggota kolaborasi.
 - (2) Bagaimana membangun komitmen antar anggota kolaborasi.
 - (3) Bagaimana pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi serta identifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi.
 - (4) Melakukan perencanaan strategik.
 - (5) *Face to face dialogue* hal ini melakukan negosiasi dengan itikad yang baik.

5. Teori Pentahelix

Latar belakang konsep *pentahelix* dibangun atas dua model sebelumnya yaitu teori *triple helix* dan teori *quadra helix*. Teori *triple helix* yakni pemangku kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan akademisi atau Perguruan Tinggi. Sedangkan *quadra helix* ditambah dengan dimunculkannya satu pemangku kepentingan yakni masyarakat madani.

Model *pentahelix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi. Kolaborasi dari lima pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. *Pentahelix* terdiri atas lima pemangku kepentingan, diantaranya:

- a) Pemerintah (*Government*)
Kelompok ini mencakup organisasi yang didanai publik, parlemen,

militer, rumah sakit dan layanan publik lainnya. pada tingkat nasional ada pemerintah nasional dan badan-badan nasional yang relevan.

- b) Dunia Usaha (*Business*)
Kelompok ini dan perwakilan sektor bisnis seperti koperasi, pengacara, akuntan, kelompok usaha UMKM, kelompok pengrajin, kelompok sentra wisata kuliner, dan profesional yang lainnya. Kelompok bisnis secara lokal, nasional atau bahkan internasional.
- c) Akademisi (Universitas atau Perguruan Tinggi)
Praktisi akademisi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk pengembangan proyek atau kebijakan. Keahlian dalam pengetahuan (arsitek, insinyur, ilmuwan, dokter, praktisi kesehatan, ahli geografi, pendidik, maupun administrasi publik) sekaligus niversitas atau organisasi riset yang tertarik pada pengembangan proyek.
- d) Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah

Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga perilaku beradab, kesopanan, budaya dan ramah dalam menghadapi lingkungannya, masyarakat yang menjaga hubungan yang harmoni, serta sikap saling menghargai kepentingan masing-masing individu dalam kelompok.

- e) Media massa (*Mass Media*)
Pelaku dalam kelompok ini adalah semua media, digital maupun bukan. Kepentingan mereka akan didorong oleh apa yang penting diketahui oleh masyarakat luas disebar melalui media yang mereka miliki.

6. Desa Wisata

Mengutip dari kegiatan Seminar yang berjudul “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Mitigasi Bencana” yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 Oktober 2022, Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993).

Adapun beberapa kriteria desa wisata antara lain:

- a) Memiliki atraksi wisata, baik berupa wisata alam, cagar budaya, kesenian, kuliner atau kerajinan.
- b) Jarak tempuh yang terjangkau dari obyek daya tarik wisata yang lain, pusat-pusat kegiatan, atau tempat tinggal wisatawan.
- c) Ketersediaan infrastruktur dan akomodasi.
- d) Penerimaan perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang baik terhadap upaya pengembangan desa wisata.

Mengutip dari Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan dengan tema “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Mitigasi Bencana” pada tanggal 27 Oktober 2022 mendiskusikan bahwa mengapa harus membangun desa wisata, karena merupakan bentuk pengembangan ekonomi lokal yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan menciptakan terjadinya pertukaran budaya dengan interaksi dengan dunia luar serta pengembangan desa wisata juga selalu identik dengan “wisata alam” dan belum mengupayakan mitigasi bencana.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah (sebagai lawan dari pengertian eksperimen). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi baik keadaan apapun kondisinya, sehingga metode ini disebut deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya.

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian ini disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Perspektif yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan peranan kolaborasi pentahelix dalam pengurangan resiko bencana pada destinasi wisata.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada Implementasi pengembangan Omah Wisata dalam studi perspektif *Collaborative Governance* dengan lima aktor yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta media massa.

Fokus yang kedua dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengembangan omah wisata yang ada di Desa Junrejo Kota Batu dengan penyandingan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash.

Penelitian ini menggunakan konsep pengukuran implementasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, maka pelaksana harus mengetahui apa yang harus dilakukan, harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan tahu penyebab kegagalan dalam kebijakan. Oleh karena itu, harus dilakukan beberapa hal, yaitu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, sebagai desa yang berada di wilayah omah wisata.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Omah Wisata Junrejo telah memulai pembangunan pada tahun 2020 sebelum pandemi Covid-19 salah satu konsep omah wisata yang mengedepankan tiga prinsip yakni mitigasi bencana, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan hidup, Omah Wisata ini dirancang dengan melibatkan masyarakat desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Guna melaksanakan pengembangan omah wisata perlunya pendekatan *collaborative governance* untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan aktor dalam mencapai tujuan pengembangan yang sama dalam pengembangan omah wisata, peran kolaboratif pada pengembangan omah wisata yakni aktor *pentahelix* dan model ini akan disandingkan terhadap indikator teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), berbagai indikator yang berkaitan yakni:

1. Pemerintah

a) Kondisi Awal

Berdasarkan berbagai literatur mengungkap bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal karena perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan sehingga muncul anggapan saling bermusuhan. Untuk membuktikan indikator kondisi awal, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana kondisi awal sebelum dan sampai saat ini perkembangannya omah wisata Junrejo dan sejauh mana kondisi sampai saat ini dalam berkolaborasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah melalui Kepala Desa sudah tidak mendukung terkait pengembang omah wisata, karena muncul perasaan tidak percaya dari awal terhadap pengelola omah wisata. Hal ini berhubungan juga dengan indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni membangun kepercayaan.

b) Desain Kelembagaan

Dalam memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan, walaupun sudah berkomunikasi secara langsung tetapi apabila kurangnya koordinasi lanjutan tidak terlaksana dengan baik, maka proses kolaborasi ini akan menimbulkan ketidak harmonisan antar pemangku kepentingan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah belum mendukung sepenuhnya terhadap pengembangan omah wisata meski selalu mendukung jika berhubungan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Junrejo. Hal ini seperti dengan apa yang ada pada variabel desain kelembagaan.

c) Kepemimpinan Fasilitas

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam berkolaborasi dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka

melakukan perundingan perundingan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Junrejo melalui kepala Desa Junrejo belum mempunyai sikap pemimpin yang fasilitatif, hal ini belum tercapai dari indikator yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash yaitu kepemimpinan fasilitatif.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini bisa yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman bersama dalam pengembangan omah wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash yakni belum mencapai indikator membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman misi, hal ini sudah dijelaskan oleh pihak pemerintah bahwa tidak ada kejelasan koordinasi lanjutan.

Dalam penelitian terdahulu berjudul “Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang” bahwa proses kolaborasi harus adanya *facilitative leadership* menjadi faktor pendukung terhadap pengembangan desa wisata Gubugklakah ini, tetapi dalam penelitian ini terdapat belum adanya *facilitative leadership* pada pemerintah desa Junrejo sendiri, seperti kurang mendukung terhadap kolaborasi pengembangan Omah Wisata, muncul rasa yang tidak baik terhadap pengelola Omah Wisata Junrejo dan berakibat buruk pada komunikasi pihak Omah Wisata terhadap pemerintah Desa Junrejo sendiri.

Peneliti berpendapat bahwa kurang setuju dengan sikap Kepala Desa Junrejo yang seakan-akan beranggapan kurang baik terhadap pengelola Omah Wisata, karena menandakan tidak adanya sikap kepemimpinan fasilitatif terhadap pelayanan masyarakat.

2. Dunia Usaha

a) Dunia Usaha

Dalam sektor dunia usaha atau bidang UMKM sangat mendukung dalam pengembangan Omah Wisata Junrejo, tepatnya di Dusun Rejoso. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan Omah Wisata sudah mencapai indikator daripada kondisi awal yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni muncul anggapan saling berkolaborasi.

b) Desain Kelembagaan

Dalam memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan, walaupun sudah berkomunikasi secara langsung tetapi apabila kurangnya koordinasi lanjutan tidak terlaksana dengan baik, maka proses kolaborasi ini akan menimbulkan ketidakharmonisan antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dunia usaha Dusun Rejoso sudah siap mendukung terkait kolaborasi dalam pembangunan omah wisata hal ini juga dapat dinilai tercapainya indikator dari teori yang dikemukakan Ansell dan Gash.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam berkolaborasi dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan perundingan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai indikator dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni sebagai fasilitator untuk berkolaborasi dan sebagai mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini bisa yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain membangun kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam pengembangan omah wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tercapainya indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dimana sudah menyentuh membangun kepercayaan, membangun komitmen, dan persamaan misi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Pengembangan desa wisata Gubugklakah Kabupaten Malang” juga sama dengan hasil kolaborasi yang dilaksanakan oleh Omah Wisata yakni peran penting dunia usaha dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif dengan aktor *pentahelix*.

Dalam teori yang dikemukakan Ansell dan Gash terdapat empat unsur dalam mewujudkan *Collaborative Governance* yang baik, seperti kondisi awal, desain kelembagaan, proses kolaborasi dan kepemimpinan fasilitatif, dimana di UMKM Rejoso sendiri dalam kondisi awal yang semula sudah terkenal dari hasil kerajinan dan sesudah adanya Omah Wisata Junrejo semakin terkenal dan meningkatnya hasil kerajinan dan berdampak kepada ekonomi lokal masyarakat, sedangkan desain kelembagaan yang saat ini di dusun Rejoso memang belum terbentuk yang di legal kan oleh badan hukum, tetapi setiap usaha yang dimiliki masyarakat sudah berdiri pribadi berbentuk UD dan CV. Akan tetapi kepemimpinan fasilitatif di kelompok dunia usaha Rejoso sudah mempunyai ketua atau koordinator sebagai fasilitator yang berhubungan dengan aktor lain yang bersama-sama dalam Omah Wisata Junrejo.

Peneliti berpendapat sangat setuju dengan adanya koordinator UMKM Rejoso karena masyarakat usaha pun sangat mendukung terhadap Omah

Wisata Junrejo karena sangat berdampak luar biasa terhadap ekonomi masyarakat lokal, dengan kepemimpinan fasilitatif koordinator UMKM pun berperan sangat penting dalam proses kolaborasi dengan aktor yang lain.

3. Masyarakat

a) Kondisi Awal

Peran masyarakat desa dalam rangka pengembangan Omah Wisata juga sangat penting. Peneliti mendapatkan temuan dan data berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat dan Komunitas Kelompok Tani Sadar Wisata (KATADARWIS) Desa Junrejo. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program tersebut sudah mencapai indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash.

b) Desain Kelembagaan

Dalam memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Walaupun sudah berkomunikasi secara langsung tetapi apabila kurangnya koordinasi lanjutan tidak terlaksana dengan baik, maka proses kolaborasi ini akan menimbulkan ketidak harmonisan antar pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat melalui KATADARWIS dalam pembangunan omah wisata hal ini juga dapat dinilai tercapainya indikator dari teori yang dikemukakan Ansell dan Gash.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam berkolaborasi dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan perundingan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai indikator dalam teori yang dikemukakan

oleh Ansell dan Gash yakni sebagai fasilitator untuk berkolaborasi dan sebagai mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini bisa dilakukan dengan memperhatikan antara lain membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman bersama dalam pengembangan omah wisata. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tercapainya indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dimana sudah menyentuh membangun kepercayaan, membangun komitmen, dan persamaan misi.

Dalam teori yang dikemukakan Ansell dan Gash dapat disandingkan dengan kepemimpinan fasilitatif dan *face to face dialogue* terhadap masyarakat dimana secara tidak langsung memberdayakan masyarakat desa melalui program *live in village* dan pemuda desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar desa serta selalu melakukan koordinasi duduk bersama pemuda desa atau karang taruna dan masyarakat sekitar Omah Wisata.

Peneliti berpendapat sangat setuju terhadap apa yang diusulkan dengan masyarakat untuk selalu melibatkan aktif masyarakat desa dan pemuda desa karena juga bisa memberdayakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

4. Akademisi

a) Kondisi Awal

Awal mula program omah wisata berasal dari program KKN, dimana konsep omah wisata bersumber dari aspek pencegahan mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Melalui program ini, juga dilakukan aksi penanaman pohon yang nantinya akan terus berkolaborasi dalam rangka meningkatkan tri dharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dan mendukung konsep omah wisata yaitu konsep desa wisata kolaboratif.

b) Desain Kelembagaan

Dalam memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan, walaupun sudah berkomunikasi secara langsung tetapi apabila kurangnya koordinasi lanjutan tidak terlaksana dengan baik, maka proses kolaborasi ini akan menimbulkan ketidak harmonisan antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat melalui KATADARWIS dalam pembangunan omah wisata hal ini juga dapat dinilai tercapainya indikator dari teori yang dikemukakan Ansell dan Gash.

c) Kepemimpinan Fasilitas

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam berkolaborasi dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan perundingan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai indikator dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni sebagai fasilitator untuk berkolaborasi dan sebagai mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini bisa yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman bersama dalam pengembangan omah wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tercapainya indikator

yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dimana sudah menyentuh membangun kepercayaan, membangun komitmen dan persamaan misi serta implementasi konsep yang digunakan omah wisata yakni desa wisata kolaboratif.

Peneliti juga mendapat data dari pengelola harian bahwa berbagai Akademisi sudah pernah melakukan kegiatan di Omah Wisata seperti KKN Tematik Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Universitas Dr Soetomo Surabaya, dan kunjungan daripada KKN Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Berdasarkan data tersebut menerangkan bahwa peran serta akademisi juga sangat penting dalam meningkatkan tri dharma perguruan tinggi sendiri dan masyarakat juga mendapat ilmu dalam pengabdian masyarakat di Omah Wisata.

Jika disandingkan dengan penelitian terdahulu dari ketiga jurnal yang diambil oleh peneliti belum ada keterlibatan aktif akademisi dalam pengembangan dalam *collaborative governance*.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni proses kolaborasi juga memerlukan usulan-usulan dari akademisi untuk pengembangan Omah Wisata, serta juga menjadi desa binaan dalam rangka pengembangan Omah Wisata ke depan yang lebih baik. Dalam dunia akademisi juga selalu berproses dan berkomitmen dalam membantu dan memberi ide serta masukan ataupun output dalam berkegiatan di Omah Wisata seperti halnya KKN Tematik Universitas Dr Soetomo yakni penanaman bibit kelengkeng dan pengarahan terkait ancaman bencana yang ada di Omah Wisata. Hal ini juga mendukung konsep

daripada wisata desa yang mengedepankan triloka tersebut.

Menurut peneliti bahwa sangat bermanfaat jika pengembangan ini selalu menggandeng akademisi, karena sama-sama saling menguntungkan dari semuanya. Akademisi juga sangat senang jika di Omah Wisata adanya program Wisata berbasis riset, dimana semua dosen ataupun akademisi boleh melakukan kegiatan wisata berbasis riset secara gratis. Akan tetapi setelah meninggalkan Omah Wisata diwajibkan untuk menulis baik artikel, jurnal, maupun riset-riset lainnya.

5. Media Massa

a) Kondisi Awal

Untuk omah wisata, sudah berkontribusi dengan sosial media dalam penulisan dan marketing pasar digital guna mendukung pengembangan omah wisata. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa program ini sudah mencapai indikator daripada kondisi awal yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni muncul anggapan saling berkolaborasi.

b) Desain Kelembagaan

Dalam memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Walaupun sudah berkomunikasi secara langsung tetapi apabila kurangnya koordinasi lanjutan tidak terlaksana dengan baik, maka proses kolaborasi ini akan menimbulkan ketidakharmonisan antar pemangku kepentingan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa siap mendukung terkait kolaborasi dalam pembangunan omah wisata hal ini juga dapat dinilai tercapainya indikator dari teori yang dikemukakan Ansell dan Gash.

c) Kepemimpinan Fasilitatif

Secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam berkolaborasi dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan perundingan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin terjadi pada proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sudah mencapai indikator dalam teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash yakni sebagai fasilitator untuk berkolaborasi dan sebagai mempermudah untuk mencapai tujuan bersama.

d) Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi ini bisa yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman bersama dalam pengembangan omah wisata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tercapainya indikator yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dimana sudah menyentuh membangun kepercayaan, membangun komitmen dan persamaan misi serta implementasi konsep yang digunakan omah wisata yakni desa wisata kolaboratif.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kontribusi media massa yang bernama Harian Disway sangat penting dalam proses pengembangan dan promosi baik di dunia cetak maupun digital. Media massa selalu menulis berita jika di Omah Wisata terdapat kunjungan wisatawan dan nantinya akan dijadikan berita dan artikel, tetapi hanya di publish dalam digital melalui Harian Disway dan portal artikel. Dari hasil publish tersebut mendapat banyak *viewer* dan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas sudah mengetahui keberadaan Omah Wisata Junrejo.

Peneliti mendapat beberapa usulan dalam pengembangan Omah Wisata seperti, selalu berkoordinasi

dengan semua *stakeholder* Omah Wisata, jika ada wisatawan nanti tim media akan melakukan penulisan berita dan selalu dipublish di media digital, segera dibuat untuk tim media promosi seperti *Instagram*, *Twitter*, *TikTok* maupun website, dan juga agar lebih mengajak media massa lain untuk mempublish kegiatan Omah Wisata sebagai sarana promosi yang lebih luas.

Dalam penelitian terdahulu, dari ketiga jurnal yang dihubungkan dalam penelitian ini memang ada ketidaksamaan dalam penelitian ini yang dimana peran penting media massa dalam mengembangkan suatu lembaga, oleh karena itu akan menjadi acuan ataupun penelitian baru.

Peneliti berpendapat bahwa sangat mendukung dengan kehadirannya media massa dalam rangka pengembangan Omah Wisata Junrejo karena peran yang sangat penting dalam rangka pengembangan itu juga butuh pasar untuk promosi. Salah satu promosi untuk mengetahui keberadaan Omah Wisata yaitu menggandeng media massa untuk membantu proses pengembangan Omah Wisata ke depan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara semua aktor *pentahelix* dalam pengembangan Omah Wisata sudah dalam proses pembangunan lanjutan baik fisik lokasi omah wisata maupun proses koordinasi antar aktor. Namun untuk lokasi Omah Wisata masih belum maksimal dalam menerima tamu atau bisa dikatakan masih apa adanya. Hal ini berdasarkan wawancara terhadap beberapa aktor dimana terlihat dalam lokasi Omah Wisata masih mempunyai fasilitas yang belum memadai. Oleh karena itu, untuk kedepannya Omah Wisata akan terus melakukan pembangunan fasilitas penunjang

untuk keberlangsungan kegiatan wisata di Omah Wisata sendiri. Tetapi sudah banyak wisatawan yang sudah mengunjungi Omah Wisata sendiri baik dalam skala kecil maupun rombongan.

Dalam pengembangan omah wisata masih banyak faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pengembangan ini. Berikut faktor pendukung dalam pengembangan Omah Wisata tersebut, diantaranya:

- a) Banyak petani-petani yang tergabung dalam kelompok tani sadar wisata (POKDARWIS) yang bergabung dan ingin bergabung dalam Omah Wisata.
- b) Keberadaan Omah Wisata yang masih tergolong alami, menyuguhkan keindahan alam eksotisme pemandangan yang indah dan luas.
- c) Adanya praktisi pendamping dari MAWINDO atau yang disebut manajemen pariwisata indonesia. Dimana ini berisi praktisi-praktisi handal untuk mengembangkan pariwisata dari nol sampai menjadi tempat pariwisata yang bagus. Mawindo juga membantu mengkonsep Omah Wisata yang menjadi program program Omah Wisata tersebut.
- d) Faktor kepemimpinan fasilitatif yakni pendiri daripada Omah Wisata yang sangat berpengalaman dalam manajemen pariwisata nasional ini sangat penting dalam pengembangan Omah Wisata Junrejo.
- e) Daya tangkap masyarakat yang siap untuk menerima tamu wisata daripada Omah Wisata Junrejo.

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pengembangan Omah Wisata tersebut, diantaranya:

- a) Belum adanya badan hukum resmi atau legalitas resmi untuk Omah Wisata.
- b) Kondisi sarana prasarana yang belum mendukung seperti tidak ada parkir yang luas, kurangnya tempat transit, dan jalan belum diperbaiki.
- c) Di dunia UMKM belum adanya pendampingan permodalan yang besar.

- d) Belum adanya investor yang masuk di Omah Wisata untuk pengembangan dan pembangunan berkelanjutan.
- e) Belum adanya dukungan Peraturan Pemerintah Desa Junrejo dalam Omah Wisata Junrejo.

Pengembangan Omah Wisata membutuhkan proses yang cukup panjang dan kompleks membutuhkan keterlibatan semua aktor untuk memikirkan dan mengeksekusi program wisata yang ditetapkan, identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat menjadi sebuah fase krusial yang secara cermat dilakukan oleh peneliti. Hal ini penting kaitannya dengan langkah selanjutnya, yakni penemuan dan strategi pembangunan infrastruktur fisik serta pengembangan sosio kultur masyarakat desa di sekitar Desa Junrejo, sebagai bagian dari upaya mewujudkan desa wisata kolaboratif dan harapan jelasnya kehidupan masyarakat desa sekitar bisa terangkat.

Dengan adanya strategi pengembangan Omah Wisata Junrejo diharapkan dapat mengembangkan Omah Wisata dengan konsep triloka desa wisata kolaboratif secara maksimal sehingga dapat memperoleh yang maksimal pula. Adanya penghambat dan pendukung pengembangan Omah Wisata ini juga diharapkan mampu meningkatkan Omah Wisata yang lebih baik.

Namun pengembangan Omah Wisata Junrejo memiliki kelemahan yang bersifat tidak menyeluruh artinya terdapat aspek yang membutuhkan penelitian lebih lanjut yang representatif. Seperti studi lanjutan mengenai tata kelola Omah Wisata dan studi dampak kegiatan pariwisata terhadap aktivitas masyarakat Desa Junrejo.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti membuat beberapa saran kepada pihak pengelola yang memiliki kaitan awal pengembangan Omah Wisata Junrejo diantaranya sebagai berikut:

- a) Bagi Pemerintah
- (1) Pemerintah Desa Junrejo hendaknya memberi dukungan lebih baik peraturan desa yang baru terhadap pengembangan Omah Wisata dan bisa membantu pembangunan infrastruktur dari dana pemerintah Desa Junrejo.
 - (2) Pemerintah Desa Junrejo juga harus memberi pelatihan kepada semua aktor yang ikut dalam pengembangan Omah Wisata seperti misalnya karang taruna untuk pelatihan *tour guide* dan UMKM diberi kegiatan pelatihan keterampilan dari dinas terkait.
 - (3) Pemerintah Desa Junrejo juga harus ikut mempromosikan Omah Wisata di masyarakat luas Junrejo.
- b) Bagi Pengelola
- (1) Meningkatkan promosi yang lebih masif melalui media digital dengan kreatif menggandeng pemuda desa atau karang taruna desa dan Dinas Pariwisata Kota Batu.
 - (2) Tidak mengurangi kelestarian lingkungan daerah sekitar Omah Wisata.
 - (3) Pengelola hendaknya segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dengan menggandeng pihak pengembang dan

investor guna untuk mengurangi beban pembiayaan pembangunan untuk menunjang pariwisata di Omah Wisata Junrejo.

REFERENSI

- Islamy, H. S. (2021). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish.
- Limanseto, H. (2021). Pembangunan Kepariwisata Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 2(1), 21–42.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Priyanto, Wardhono, H., Kamariyah, S., Asnawi, A., & Arfani, M. (2022). Pengembangan Pariwisata Omah Wisata Berbasis Masyarakat dan Kearifan Lokal di Desa Junrejo Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 18–32.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Suweana, I. K., & Widyatmaja, I. G. (2017). *Pengetahuan Dasar Pariwisata*. Bali: Pustaka Larasan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

